



# **RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Tentara Pelajar No – Telp. (0294) 381178 Kendal 51316  
Email : [dinsos@kendalkab.co.id](mailto:dinsos@kendalkab.co.id)  
Website : [www.dinsos.kendalkab.go.id](http://www.dinsos.kendalkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Kerja (RENJA) ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 yang merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.

Renja Dinas Sosial ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 mendatang.



# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2. Capaian Kinerja Pelayanan PD	15
3. Prestasi yang Dicapai Tahun Lalu	16
4. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tupoksi	17
5. Reviu terhadap rancangan awal RKPD	18
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	19
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah	19
2. Tujuan dan sasaran target kinerja Renstra PD	19
3. Program dan Kegiatan	23
4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan	23
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Lampiran)	23
BAB V Penutup	24

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkun
2. gan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

### **3. Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

#### **Maksud :**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal. untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

#### **Tujuan :**

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2. sebagai pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. sebagai penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

#### **4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.**

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu
- 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Prestasi yang dicapai tahun lalu
- 2.4 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi
- 2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Lampiran)

BAB V Penutup.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program-program/kegiatan yang tidak mencapai target, telah mencapai target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Tahun 2022 dalam Renja Perangkat Daerah melaksanakan 6 Program dengan 15 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.880.905.468. Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut, dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran dan program prioritas Bupati, maka sebagian besar OPD dilakukan rasionalisasi anggaran terutama untuk program yang telah tercapai namun dengan tetap memperhatikan ketercapaian dan kelanjutan ketercapaian. Bawa pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengelola anggaran bersumber dari DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) yang di gunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, selain itu Dinas Sosial juga menangani penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) penanganan dampak inflasi, sasaran BLT penanganan dampak inflasi yaitu tukang ojek pangkalan dan online, tukang becak dan kusir andong.

Salah satu prioritas program Bupati/Wakil Bupati adalah pemberian santunan kemaatian kepada penduduk miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Program tersebut salah satu bentuk bantuan sosial dalam penanganan masyarakat miskin..

Anggaran Tahun 2022 terserap Rp. 16.447.337.895,00 (87,11 %). Sedangkan untuk capaian kinerja sudah terealisasi sesuai target atau sebesar 97,98 %.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal , sebagaimana lampiran 1.

Sedangkan secara singkat hasil hasil kegiatan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Jumlah program tahun 2022 ada 6 program, sebagai berikut :

##### (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dari program tersebut adalah Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% dengan capaian realisasi Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% atau tingkat

capaiannya 100%. Untuk anggaran dalam pelaksanaan program tersebut sebesar Rp5.830.163.917; dengan realisasi pelaksanaan program Rp5.336.799.834; atau capaian keuangan mencapai 91,54%. Analisa dari program diatas adalah program tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah sehingga diperoleh manfaat yaitu pelaksanaan layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah yang baik.Tidak ada permasalahan yang ditemui karena bersifat penyediaan.Tindaklanjut atas rekomendasi DPRD tidak ada.

#### (2) Program Pemberdayaan Sosial

Target dari program tersebut adalah Persentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga sebesar 100%, dengan capaian realisasi Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga 100%. Untuk anggaran dalam pelaksanaan program tersebut sebesar Rp625.000.000; dengan realisas pelaksanaan keuangan sebesar Rp583.142.530; atau capaian keuangan mencapai 93,3%;. Analisa pelaksanaan program sampai tahun 2022 kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat sejumlah 480orang dan pekerja sosial masyarakat sejumlah 325 orang. Dengan Jumlah PSKS lembaga dan PSKS non lembaga yang sudah ditingkatkan kapasitas akan dapat membantu Pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial. Tindaklanjut atas rekomendasi DPRD tidak ada.

#### (3) Program Rehabilitasi Sosial

Target dari program tersebut adalah Persentase PPKS di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial.Persentase dari program rehabilitasi sosial dengan capaian realisasi persentase kinerja sebesar 100%. Untuk anggaran dalam pelaksanaan program tersebut sebesar Rp 755.650.000; dengan realisasi keuangan pelaksanaan program tersebut sebesar Rp655.953.981; atau capaian keuangan mencapai 86,81%. Analisa dari program diatas adalah Menangani PPKS yang masuk SPM disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis dan menangani PPKS diluar panti yang bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA.Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS di luar panti.Analisa pelaksanaan program tahun 2022 terdapat 2 target yang harus di sasar yaitu PPKS terlantar dan PPKS non terlantar.

#### (4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Target dari program tersebut adalah persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Untuk anggaran dalam melaksanakan program tersebut sebesar

Rp11.095.091.551; dengan realisasi pelaksanaan program tersebut sebesar Rp9.312.888.258; atau capaian keuangan mencapai 83,94%, Analisa program perlindungan dan jaminan sosial adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga kepada masyarakat. pelaksanaan Program perlindungan sosial bertujuan menfasilitasi bantuan kebutuhan dasar agar tepat sasaran.

(5) Program Penanganan Bencana

Target dari program tersebut adalah persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap bencana dengan capaian realisasi kinerja sebesar 99,36%. Untuk anggaran dalam melaksanakan program tersebut sebesar Rp 445.000.000; dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp 429.210.600; atau capaian keuangan mencapai 96,45%. Analisa program penanganan bencana adalah pemenuhan bantuan dasar untuk korban bencana alam dan sosial, bantuan sandang dan pangan serta dapur umum. Untuk tahun 2022 penyaluran bantuan dapat berjalan lancar tanpa kendala.

(6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Target dari program pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dengan capaian realisasi 100%. Untuk anggaran pelaksanaan program tersebut Rp 130.000.000; dengan realisasi pelaksanaan program Rp 129.342.656; atau capaian keuangan mencapai 99,49%. Analisa program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah pengelolaan dan perawatan rutin Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati Kendal selama satu tahun. Untuk perawatan dan pengelolaan pada dasarnya berjalan lancar.

2. Capaian target kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan pada setiap urusan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yg dihadapi serta solusinya.

Pada tahun 2022 jumlah kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal ada 15kegiatan dengan 42 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dari kegiatan tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sebanyak 8 dokumen dengan capaian realisasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD sebanyak 1 dokumen atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp83.300.000; dengan realisasi Rp78.326.500; atau capaian

keuangan mencapai 94,03%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target dari kegiatan tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 12 laporan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp15.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp14.777.000; atau capaian keuangan mencapai 98,51 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- c. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

Target dari kegiatan terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian realisasi pengawasan penilaian evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah selama satu tahun dengan capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di anggarakan

Rp 15.000.000; dengan realisasi keuangan Rp 14.956.500; atau capaian keuangan mencapai 99,71%. Analisa pelaksanaan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

## (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dari kegiatan tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan dengan capaian realisasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur sebanyak 14 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp4.150.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.739.056.136; atau capaian keuangan mencapai 90,1% Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target dari kegiatan tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp185.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp183.075.000; atau capaian keuangan mencapai 98,96% Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

**(3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Target dari kegiatan tersebut terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan.Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebanyak 50 orang dengan capaian realisasiPegawai yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebanyak 50 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp50.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp49.287.500; atau capaian keuangan mencapai 98,58%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

**(4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target dari kegiatan tersebut tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 12 bulan dengan capaian realisasi Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp25.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp24.218.000; atau capaian keuangan mencapai 96,87%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target dari kegiatan tersebut tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan dengan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. dengan capaian realisasi Penyediaan Alat Rumah Tangga selama 12 bulan atau tingkat capaian nya 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp30.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp 26.769.000; atau capaian keuangan mencapai 89,23%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target dari kegiatan tersebut tersedianya bahan logistik kantor, Jumlahpaket bahan logistik kantor yang disediakan. penyediaan makanan dan minuman kantor12 bulan dengan capaian realisasi jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman kantor 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp37.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp35.256.000; atau capaian keuangan mencapai 95,29 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target dari kegiatan tersebut adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 bulan dengan realisasi bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tersebut dianggarkan sebesar Rp10.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp9.489.750; atau capaian keuangan mencapai atau capaian keuangan mencapai 94,9 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target dari kegiatan tersebut tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakandengan capaian realisasi Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp3.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.560.000; atau capaian keuangan mencapai 52 %.Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target dari kegiatan tersebut terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraanrapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian realisasi bulan penyelenggaraanrapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12Bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp230.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp227.460.544;atau capaian keuangan mencapai 98,9 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

(5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah pengadaan perlengkapan kantorsebanyak 10 buah. Dengan capaian realiasasi Jumlah pengadaan perlengkapan kantorsebanyak 10 buah atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp50.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp49.570.600; atau capaian keuangan mencapai 99,14%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

**(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan. Dengan capaian realisasi jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp3.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.708.300; atau capaian keuangan mencapai 90,28%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target dari kegiatan tersebut adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan selama 12 bulan dengan capaian realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp149.082.500; dengan realisasi keuangan sebesar Rp95.746.536, atau capaian keuangan mencapai 64,22%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target dari kegiatan tersebut adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. terbayarnya honor tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga sopir selama 12 bulan. Dengan capaian realisasi bulan terbayarnya honor tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga sopir 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp141.781.417; dengan realisasi keuangan sebesar Rp141.365.068; atau capaian keuangan mencapai 99,71% Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

**(7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Target dari kegiatan tersebut tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya selama 12 bulan dengan capaian realisasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Aset Tetap Lainnya sebanyak 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar

Rp63.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp54.572.500; atau capaian keuangan mencapai 86,62%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target dari Kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Dengan capaian realisasi jumlah bulan sebanyak 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp120.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp119.994.400, atau capaian keuangan mencapai 99%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Dengan capaian realisasi gedung atau bangunan yang direhabilitasi 2 gedung/ bangunan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarakan sebesar Rp 450.000.000; dengan realisasi keuangan Rp 448.610.500 atau capaian keuangan mencapai 99,69%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

d. Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Target dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Dengan capaian bulan pemeliharaan rutin dan berkala selama 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan Rp 20.000.000; dengan realisasi keuangan Rp 20.000.000; atau capaian keuangan mencapai 100%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

(8) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota

Target dari kegiatan tersebut Jumlah anggota organisasi sosial pelaku kesejahteraan sosial yang di tingkatkan kemampuannya 325 orang. Dengan capaian Jumlah anggota organisasi sosial pelaku kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 325 orang atau tingkat capaiannya 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp285.000.000; dengan realisasi keuangan Rp26.956.758; atau capaian keuangan mencapai 94,72 % Analisa pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaku kesejahteraan sosial sangat penting dilaksanakan agar dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah dan masyarakat berkerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

- b. Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah anggota tenaga kesejahteraan sosial yang di tingkatkan kemampuannya 20 orang. Dengan capaian Jumlah anggota tenaga kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 20 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp50.000.000; dengan realisasi keuangan Rp45.041.072; atau capaian keuangan mencapai 90,08 % Analisa pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaku tenaga kesejahteraan sosial sangat penting dilaksanakan agar dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah dan masyarakat berkerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

- c. Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah anggota tenaga kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya 480 orang. Dengan capaian Jumlah anggota tenaga kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kemampuannya sebanyak 480 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp290.000.000; dengan realisasi keuangan Rp268.144.700; atau capaian keuangan mencapai 92,46 % Analisa pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaku tenaga kesejahteraan sosial sangat penting dilaksanakan agar dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah dan masyarakat berkerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

- (9) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

- a. Sub kegiatan Penyediaan permakanan

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penerima permakanan yang diterima oleh penerima manfaat sebanyak 200 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 112.800.000; dengan realisasi keuangan Rp 103.264.656; atau capaian keuangan mencapai 91,55%

Analisa pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan pada penerima manfaat yang dilaksanakan di rumah singgah dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. Sub kegiatan Penyediaan sandang

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penerima sandang/pakaian yang diterima oleh penerima manfaat sebanyak 100 stellatau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 20.800.000; dengan realisasi keuangan Rp 20.799.700; atau capaian keuangan mencapai 99% Analisa pelaksanaan kegiatan pemberian sandang/pakaian pada penerima manfaat yang dilaksanakan di rumah singgah dapat dilaksanakan dengan lancar.

c. Sub kegiatan penyediaan alat bantu

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penerima alat bantu yang diterima oleh penerima manfaat sebanyak 14 buahatau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 40.000.000; dengan realisasi keuangan Rp 33.300.000; kegiatan tersebut terlaksana 100%. atau capaian keuangan mencapai 83,25%. Analisa pelaksanaan kegiatan pemberian alat bantu pada penerima manfaat yang dilaksanakan di rumah singgah dapat dilaksanakan dengan lancar.

d. Sub kegiatan pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual, dan sosial

Target dari kegiatan tersebut Jumlah kegiatan bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial yang dilaksanakan dirumah singgah sebanyak 60 orang.dengan capaian realisasi Jumlah kegiatan bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial yang dilaksanakan dirumah singgah sebanyak 60 orangatau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 35.180.000; dengan realisasi keuangan Rp 24.801.625; atau capaian keuangan mencapai 70,5% Analisa pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di rumah singgah dapat dilaksanakan dengan lancar, kegiatan tidak hanya dirumah singgah tetapi juga dengan datang langsung kelapangan berdasarkan laporan dari masyarakat agar dalam pelaksanaan penaganan rehabilitasi sosial bisa secara cepat dan menyelesaikan masalah.

e. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Keluarga yang diberikan bimbingan sosial 260 orang.dengan capaian realisasi Jumlah Keluarga yang diberikan bimbingan sosial 260 orangatau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp380.050.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp.351.164.000;atau capaian keuangan mencapai92,4%.

Analisa pelaksanaan Kegiatan tersebut untuk menunjang penanganan permasalahan rehabilitasi sosial dasar kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Pengemis dan Gelandangan yang masuk ke dalam SPM Dinas Sosial maka keluarga dari Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Pengemis dan Gelandangan juga diberikan bimbingan dan arahan agar bisa tercipta rehabilitasi sisoal yang maksimal dengan melibatkan keluarga penyandang masalah.

f. Sub Kegiatan Pemberian layanan kedaruratan

Target dari kegiatan tersebut Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan pemberian layanan rujukan 12 bulan. Dengan capaian pelaksanaan fasilitasi layanan rujukan 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp12.000.000; dengan realisasi keuangan Rp11.105.000; atau capaian keuangan mencapai 92,54 % Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin untuk melayani masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menerima bantuan sosial dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan dal lain-lain.

g. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

Target dari kegiatan tersebut Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan pemberian layanan rujukan 24 Orang . Dengan capaian pelaksanaan fasilitasi layanan rujukan 24 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp25.000.000; dengan realisasi keuangan Rp4.222.500; atau capaian keuangan mencapai 16,89 % Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin untuk melayani masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menerima bantuan sosial dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan dal lain-lain.

(10) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

a. Sub kegiatan Penyediaan alat bantu

Target dari kegiatan tersebut adalah jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan alat bantu yang diselenggarakan 12 bulan dengan capaian realisasi jumlah bulan pelaksanaan penerimaan alat bantu peneri manfaat yang diselenggarakan 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 220.000; dengan realisasi sebesar Rp220.000; atau capaian keuangan mencapai 100 % Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut kerjasama dengan panti-panti rehabilitasi, LKSA dan Rumah Sakit untuk penaganan rehabilitasi sosial.

b. Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/ Kota

Target dari kegiatan tersebut adalah jumlah bulan pelaksanaan kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan 12 bulan dengan capaian realisasi jumlah bulan pelaksanaan kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan 12 bulan atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 129.600.000; dengan realisasi sebesar Rp107.076.500; atau capaian keuangan mencapai 82,62 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut kerjasama dengan panti-panti rehabilitasi, LKSA dan Rumah Sakit untuk penanganan rehabilitasi sosial.

(11) Kegiatan Pemeliharaan Anak – Anak Terlantar

a. Sub kegiatan Penjangkauan anak-anak terlantar

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penjangkauan anak terlantar 44 orang.dengan capaian realisasi Penjangkauan kepada44anak terlantar atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp10.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.016.500; atau capaian keuangan mencapai50,16 %.Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penjangkauan atau asesmen kepada anak-anak terlantar agar dapat kita tentukan arah selanjutnya dalam penanganannya.

b. Sub kegiatan Rujukan anak – anak terlantar

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah rujukan anak terlantar 44 orang dengan capaian realisasi rujukan kepada 44 anak terlantar atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp10.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.156.500; atau capaian keuangan mencapai 51,56 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah rujukan kepada anak-anak terlantar agar dapat kita tentukan arah selanjutnya dalam penanganannya.

c. Sub kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar 104 orang dengan capaian realisasi kepada 104 anak terlantar atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp10.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.374.000; atau capaian keuangan mencapai 43,74 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penerima manfaat khususnya anak terlantar yang mendapatkan bantuan Yatim Piatu (YAPI) dapat terpantau dan terakomodir dengan baik.

(12) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan pengelolaandata fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah desa / kelurahan yang dikelola data kemiskinaan dan fakir miskin 286 desa/ kelurahan. dengan capaian realisasi

kegiatan jumlah desa / kelurahan yang dikelola data kemiskinan dan fakir miskin 286 desa/ kelurahan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp250.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp226.169.3080.; atau capaian keuangan mencapai 90,47 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penerimaan data dari verifikator desa yang dimasukan ke aplikasi diolah dan disahkan oleh kementerian sosial.

b. Sub kegiatan Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial keluarga 12 bulan dengan capaian realisasi jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial keluarga 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 10.755.091.551; dengan realisasi keuangan Rp 9.020.163.750; atau capaian keuangan mencapai 83,87%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dalam penaganan bantuan sosial kesejahteraan keluargaberk dari pemerintah pusat , provinsi maupun daerah.Bantuan yang dari pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan ( PKH ) , Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ), PBI APBN. Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah seperti operasional santunan kematian bagi masyarakat miskin yang meninggal dunia dan masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial.

c. Sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi sebanyak 150 orang dengan capaian realisasi jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi atau tingkat capaian 100%. Dalam kegiatan tersebut dianggarkan Rp 60.00.000 dengan realisasi keuangan Rp 52.008.200; atau capaian keuangan mencapai 86,68 %. Analisis kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pemantau dan monitoring dan bimbingan kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan usaha bersama sebanyak 150 orang, agar kelompok usaha bersama bisa semakin maju dan bisa membantu perekonomian masyarakat.

(13) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan penyediaan makanan

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah masyarakat terdampak bencana yang menerima bantuan dasar 328 orang dengan capaian realisasi Jumlah masyarakat terdampak bencana yang menerima bantuan dasar 328 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp140.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp 130.676.700; atau capaian keuangan mencapai 93,34 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut penyaluran

bantuan makanan untuk korban bencana alam dan sosial yang terjadi di Kabupaten Kendal selama tahun 2022.

(14) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota

a. Sub kegiatan Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Target dari kegiatan tersebut Jumlah Pendamping sosial (TARUNA SIAGA BENCANA) yang ditingkatkan kemampuannya 60 orang dengan capaian realisasi Jumlah Pendamping sosial (TARUNA SIAGA BENCANA) yang ditingkatkan kemampuannya 60 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp305.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp 298.533.900; atau capaian keuangan mencapai 97,88%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pengetahuan bagi anggota Taruna Siaga Bencana agar dalam siap dalam melaksanakan tugas membantu masyarakat saat terjadi bencana maupun saat tanggap darurat dan pasca bencana.

(15) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi dengan capaian realisasi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp100.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp 99.371.000; atau capaian keuangan mencapai 99,37 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk operasional pemeliharaan kebersihan perawatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati Knedal selama satu tahun.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi dengan capaian realisasi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp30.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29.971.656; atau capaian keuangan mencapai 99,91 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk operasional pemeliharaan kebersihan perawatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati Knedal selama satu tahun.

## 2. Kinerja Capaian Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kendal merupakan OPD yang menangani urusan wajib dasar bidang sosial sebagaimana diamantkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Dinas Sosial mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Bidang Sosial Pemerintahan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal; tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal, disebutkan sebagai berikut sebagai berikut :

### Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Dinas Sosial mempunyai fungsi:
- c. Perencana program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sosial;
- d. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas kegiatan bidang sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
- f. Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang sosial.

**Tabel 2.1**  
**b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2022**

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024				
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	
<b>Indikator Kinerja Utama</b>										
A.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti		65,92	67,62	69,32	71,02	144,93 %	69,32		
	Persentase PSKS Lembaga dan		26,53	33,33	40,14	46,94	228,02 %	40,14		

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024				
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13	
	PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi									
	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		75	80	85	90	100 %	85		
	Nilai SAKIP		71,95	73,06	74,14	76,39	(Nilai SAKIP belum Keluar)	74,14		
<b>Indikator Kinerja Kunci</b>										
I.	Percentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	
	Percentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	
<b>Indikator Program</b>										
1	Percentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah yang ter update	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	
2	Percentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	Prosentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	-	100	100	100	100	100%	100%	100%	

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13
4	Prosentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	100	100	100	100	100%	100%	100%
5	Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	-	100	100	100	100	100%	100%	100%
6	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	-	100	100	100	100	100%	100%	100%
8	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP		75	80	85	95	100	100	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal sebagai berikut:

Tabel Hasil Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan ke-sejahteraan so-sial di Luar Panti	67,62	67,62	144%	Sangat Tinggi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	33,33	76	228%	Sangat Tinggi

Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80	80	100%	Sangat tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	71,95	75,50	BB	Sangat Baik

Capain kinerja Dinas Sosial tahun 2022 sesuai dengan tabel di atas semua sasaran capainnya di atas 100%, walaupun ada kendala dan permasalahan berkaitan dengan kode rekening belanja di beberapa sub kegiatan karena penggunaan sistem baru SIPD dapat di atasi di pergeseran anggaran, sehingga dapat mendorong capaian kinerja yang memuaskan.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal , sampai tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya. Adapun hasil penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat pada Tabel Daftar Implementasi Target dan Capaian dan Penerapan SPM sebagai berikut:

#### SPM BIDANG SOSIAL PEMKAB KENDAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN (dalam %)					KET.
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
4.	Rehabilitasi sosial dasar khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	

### **3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal terus berusaha meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi tetap diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Ada beberapa masalah strategis yang sedang dihadapi, antara lain peningkatan populasi PPKS jalanan pada, integrasi data PPKS dengan DTKS untuk akses program bantuan dari Pemerintah Pusat,Masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran berdasarkan laporan dari masyarakat. .

Pada Tahun 2022, dengan 6 (Enam) program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam setahun telah diupayakan sebaik-baiknya namun dalam pelaksanaan di lapangan, tidak hanya tergantung kepada aparat Dinas Sosial Kabupaten Kendal tetapi terkait pula dengan Organisasi Sosial (OrSos) sebagai mitra kerja. Hal tersebut terutama yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang menyentuh masyarakat, guna mewujudkan implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas administrasi program kegiatan yang kadang tidak seiring dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan, menjadi permasalahan tersendiri yang ikut mempengaruhi kinerja keuangan terkait proses pencairan maupun penyerapan anggaran.

Selain keterbatasan anggaran yang merupakan masalah klasik yang dijadikan alasan penghambat pelaksanaan program kegiatan, luasnya wilayah pelayanan atau banyaknya warga yang belum terjangkau dalam pemberian pelayanan sesuai kewenangan serta adanya program dan kegiatan yang lokasinya kurang sesuai dengan kewenangan namun juga harus didukung dan ditangani secara maksimal menjadikan permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Hal ini pada dasarnya secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal.

Berbagai permasalahan yang ada pada dasarnya merupakan tantangan yang harus dihadapi sekaligus peluang yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, tantangan sekaligus peluang sebagai isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut adalah:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM biadang sosial;
2. Masih adanya lanjut usia dari keluarga miskin di atas usia 70 tahun yang belum menerima bantuan sosial.
3. Masih perlunya perbaikan di data kesejahteraan social;
4. Sangat di butuhkanya rumah singgah dalam mendukung capaian SPM untuk penanganan PPKS dengan ketelantaran.

Dari isu tersebut menuntut keseriusan yang sungguh-sungguh dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja semua pihak yang terlibat. Penanganan terhadap PPKS dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan terkoordinasi lintas sektoral sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang baru. Keseimbangan antara upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kualitas aparatur melalui berbagai kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap etos kerja pegawai. Selain itu upaya pembinaan mitra kerja perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja serta rasa tanggungjawab bersama dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang.

Disamping menyangkut permasalahan terkait sumber daya manusia, dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja juga perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan itu, penambahan personil serta pendanaan juga sangat diperlukan, sehingga dalam penanganan PPKS dengan memberikan pembinaan secara maksimal yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

## **5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Ada permasalahan yang masih menjadi isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial, khususnya indikator jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial, tingkat capaiannya hanya 40%. Hal ini terkait pembatasan pengiriman PM ke Barehsos karena terkendala Pandemi Covid-19 sehingga pihak Panti untuk sementara tidak menerima Penerima Manfaat (PM).

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Bidang-bidang berjalan baik. Hanya dalam pengumpulan data dari masing-masing Bidang mengalami sedikit keterlambatan, kurang keserasian/kesesuaian target indicator sasaran sehingga tidak mencerminkan hasil/outcome pada Renstra.

Sebagai proses, maka rancangan awal RKPD maupun rancangan renja PD sudah sewajarnya terjadi berbagai perubahan. Hal ini seiring dengan perjalanan waktu dan mekanisme yang dilalui. Banyaknya program dan kegiatan yang diusulkan serta hasil analisa terhadap isu-isu yang berkembang dan keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan alokasi kegiatan/anggaran agar hasil akhir yang diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.

Hal yang menarik dalam pelaksanaan “Program Sosial” Tahun 2023 adalah dengan dilaksanakan program prioritas Kepala Daerah untuk Tahun 2023 yang meliputi (1) Pemutakhiran DTKS, (2) Bantuan Sosial Keluarga Harapan Kabupaten Kendal (3), Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Solusi dalam menghadapi permasalahan antara lain dengan melakukan rapat koordinasi dan mereview kembali perencanaan kegiatan serta merevisi Renstra sesuai saran dan masukan hasil reviu.

**Tabel 2.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,215,000,000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.830.163.917	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase serapan aspirasi hasil Musrenbang dalam dokumen RKPD	100 %	210,000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase serapan aspirasi hasil Musrenbang dalam dokumen RKPD	100 %	113.300.000	Penyesuaian belanja
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,325,000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.335.000.000	Dinamika penyediaan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase ketersediaan sarana administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	140,000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase ketersediaan sarana administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	50.000.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	535,000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	335.000.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	360,000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	50.000.000	Dinamika kebutuhan sarana prasarana kantor
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase Pengadaan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	100 %	420,000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN KENDAL	Prosentase Pengadaan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	100 %	293.863.917	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase pengadaan sarana jasa penunjang administrasi perkantoran	100 %	1,225,000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN KENDAL	Persentase pengadaan sarana jasa penunjang administrasi perkantoran	100 %	653.000.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	100 %	490,000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	100 %	625.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	100%	30,000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani	100%	0	Rasionalisasi anggaran
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL)	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	100	460,000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL)	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	100	625.000.000	Prioritas
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Prosentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	1,002,600.000	PROGRAM PERI PERI INDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Prosentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	85,45	755.650.000	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	412,600.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PMKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	100%	625.830.000	Penyesuaian Belanja
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HI V/A DS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	KABUPATEN KENDAL	Jumlah laporan dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsi ASN	100 %	590,000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	70,91 %	129.820.000	Rasionalisasi
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Prosentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	85,45	3,430,000.000	PROGRAM PERI PERI INDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Prosentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	85,45	11.095.091.551	
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PMKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	100%	75,000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PMKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	100%	30.000.000	Rasionalisasi
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	70,91 %	3,355,000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Prosentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	70,91 %	11.065.091.551	Prioritas
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Prosentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	100 %	275,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Prosentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	100 %	445.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
			dan setelah tanggap darurat bencana					dan setelah tanggap darurat bencana			
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	185,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	140.000.000	Penyesuaian Belanja
2	Penvelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	100 %	90,000,000	Penvelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan	100 %	305.000.000	Penyesuaian Belanja
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP	80 %	620,000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP	80 %	130.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80 %	620,000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	KABUPATEN KENDAL	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80 %	130.000.000	
	<b>Jumlah</b>				<b>15,032,600.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>13.739.836.516</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang merupakan tahun kelima periode RPJMN 2020-2024, mempunyai tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan”. Untuk itu, skala prioritas pembangunan akan berfokus pada Ketahanan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, Peningkatan SDM Berkualitas, Revolusi Mental, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Lingkungan Hidup, dan Stabilitas Politik dan Hukum.

Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

- **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

- **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2024**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada "Perwujudan Tata Kelola Pemerintah yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City". Arah kebijakan ini fokus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean and good governance, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transporation.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ditekankan pada :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta teknologi IT dan mendorong inovasi pelayanan publik;
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan;
3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya;
4. Meningkatnya pembinaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
5. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
6. Memberikan jaminan sosial terhadap penduduk rawan pangan;
7. Mengembangkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat;
8. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
9. Menciptakan kondisi yang kondusif dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk; dan
10. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten KenDal Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya UKM /Industri Kecil Menengah (IKM), BumDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata;
  - a. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas investasi;
  - c. Peningktan jumlah wirausaha muda pemula;
  - d. Penguatan dan penambahan lapangan kerja;

- e. Peningkatan peran Pariwisata dalam pembangunan daerah;
  - f. Pembentukan kelompok sadar wisata penerapan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainable (CHSE) pelaku wisata, penerapan E Tourism, dan E marketing, serta pengembangan produk UMKM yang sesuai dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas BUMD dan BUMDes
  - h. Pembangunan BUMD untuk optimalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan :
- a. Penguatan Smart Health dan kualitas pelayanan kesehatan;
  - b. Jaminan pelayanan kesehatan gratis dan perluasan keanggotaan BPJS masyarakat;
  - c. Dokter on call;
  - d. Puskesmas berakreditasi A;
  - e. Optimalisasi posyandu ibu, anak, dan lansia;
  - f. Program Keluarga Harapan (PKH) Plus APBD Kabupaten Kendal
3. Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0 :
- a. Penguatan Smart Education dan kualitas pelayanan pendidikan;
  - b. Beasiswa pendidikan untuk siswa miskin berprestasi;
  - c. Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama;
  - d. Penyediaan dan peningkatan jaringan internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung pelayanan pendidikan;
  - e. Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta;
  - f. Mendorong tumbuhnya industri kreatif, start up dan bisnis online;
  - g. Program Job Market Fair (Festival Bursa Tenaga Kerja)
4. Pemerataan Infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian :
- a. Penyelesaian infrastruktur jalan kabupaten berkondisi mantap;
  - b. Revitalisasi dan penataan Alun-alun dan Rungga Terbuka Hijau ;
  - c. Pembangunan dasar di area-area wisata;
  - d. Pemantauan lalu lintas melalui CCTV sebagai bagian dari Smart City Kendal;
  - e. Pembangunan trayek angkutan dan moda transportasi publik yang terintegrasi;
  - f. Peningkatan fungsi terminal dan stasiun yang terintegrasi pusat-pusat kegiatan kota, dengan fokus pengembangan pada stasiun yang memungkinkan untuk dilakukan integrasi;
  - g. Pembangunan dan Peningkatan jaringan TIK.
5. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim :
- a. Optimalisasi forum penanggulangan bencana untuk mendorong peran aktif masyarakat;
  - b. Program pengelolaan resiko bencana untuk mitigasi bencana;

- c. Program desa tangguh bencana;
  - d. Program kampung iklim berbasis komunitas;
  - e. Pembangunan infrastuktur pencegah bencana banjir dan longsor;
  - f. Menerapkan kurikulum sekolah siaga bencana pada tingkat SD, SMP, SMA sederajat;
  - g. Elektrifikasi pedesaan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (energi mix).
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani :
- a. Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - b. Melakukan reforansi birokrasi berbasis merit system;
  - c. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE);
  - d. Peningkatan kerjasama lembaga penelitian pemerintah, swasta dan akademisi;
  - e. Inventarisasi dan asset management berbasis digital;
  - f. Peningkatan kemantapan kelembagaan daerah;
  - g. Peningkatan clean and good governances;
  - h. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
  - i. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Tabel 3.1.  
**Persandingan Arah Kebijakan s/d Penyusunan Program/KegiatanRenja 2024 BKPP Kabupaten Kendal**

Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Nasional)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Provinsi)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan/Program Prioritas/Fokus (Daerah)	Pokok Pikiran DPRD	Program/Kegiatan (Belanja Langsung) dalam Renja 2024 (PMDN 13/2006 dan Renstra 2021-2026)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung pengendalian inflasi yang lebih optimal	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dengan mendorong tumbuhnya UKM/IKM, BumDes, pertanian dan pengembangan destinasi wisata		
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan		
SDM berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan daya saing SDM yang handal dan berkarakter dalam menghadapi era industri 4.0		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				<b>Program Kepegawaian Daerah</b>
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pemerataan Infrastruktur dengan berbasis peningkatan konektivitas wilayah pendukung perekonomian		
Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penigkatan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim		
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>

### **a. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah**

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan, rencana yang selanjutnya menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu satu tahun tersebut, tidak dapat lepas dari dokumen perencanaan diatasnya seperti renstra OPD maupun RPJMD Kabupaten Kendal.

Sebagai kelanjutan dari renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **1.1.Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial yaitu

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan  
permasalahan kesejahteraan sosial”

#### **1.2.Sasaran**

- a. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan.
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Perumusan tujuan, sasaran, dan target Dinas Sosial kami tampilkan di tabel berikut:

**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan per masalah kesejahteraan sosial		Tingkat Kesejahteraan I		Persen	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57
	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat-kan pelayanan pemenuhan ke- sejahteraan so-sial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelaya- nan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan X 100	%	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72
	Meningkatnya par- tisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan ke-sejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan X 100	%	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74
	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan ter-hadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase peme-nuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	75	80	85	90	95	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP	Skor`	71,95	73,06	74,14	76,39	77,50	80

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal diupayakan selaras dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mempedomani kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kendal melalui kebijakan pembangunan perangkat daerah. Disamping itu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diamanatkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan hal tersebut perlunya adanya penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah yang kemudian tertuang dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dimana Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 merupakan tahap awal penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu "Kendal Smart City", yang menitikberatkan pada pembangunan "Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City"., Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah juga sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja PD ini mengacu

pada RPJMD 2021-2026, Renstra PD, rancangan awal RKPD, penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan provinsi dan daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan akhir Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Penyusunan ini masih mempedomani RPJMD serta Renstra yang dijabarkan pada Renja PD Tahun 2024 dan merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 yang bertemakan “KENDAL SMART CITY”.

Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang rutin dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

Rumusan dan pemetaan ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; yang dijabarkan dalam 3 Program 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan serta disinkronkan dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL**

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>													
<b>1</b>	<b>06</b>			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1	06	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Kab Kendal	100 %	10.440.071.000	PAD		100%	6.362.899.730,00	
1	06	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat Daerah	Kab Kendal	100%	300.000.000	PAD		100%	230.000.000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kendal	8 Dokumen	150.000.000	PAD		8 Dokumen	100.000.000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kendal	6 Laporan	50.000.000	PAD		6 Laporan	35.000.000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kendal	12 Laporan	100.000.000	PAD		12 Laporan	95.000.000
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Kab Kendal	100 %	4.925.795.850	PAD		100 %	4.791.899.730

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan	Kab Kendal	462 orang/bulan	4.625.795.850	PAD		462 orang/ bulan	4.591.899.730
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab Kendal	2 Dokumen	300.000.000	PAD		2 Dokumen	200.000.000,
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>165.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>165.000.000,</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Kendal	1 Paket	25.000.000	PAD		1 Paket	25.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Kendal	2 Dokumen	5.000.000	PAD		2 Dokumen	5.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Kendal	10 Orang	30.000.000	PAD		10 Orang	30.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Megikuti Sosialisasi Pertauran Perundang undangan	Kab Kendal	30 Orang	30.000.000	PAD		30 Orang	30.000.000,
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenasi Peraturan Perundang Undangan	Kab Kendal	50 Orang	75.000.000	PAD		50 Orang	75.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>388.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>388.000.000</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kendal	2 Paket	10.000.000	PAD		2 Paket	10.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kendal	1 Paket	25.000.000	PAD		1 Paket	25.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab Kendal	12 Paket	15.000.000	PAD		12 Paket	15.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kab Kendal	12 Paket	60.000.000	PAD		12 Paket	60.000.000

					disediakan						
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Kendal	1 Paket	15.000.000	PAD	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab Kendal	12 Dokumen	3.000.000	PAD	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kendal	12 Laporan	250.000.000	PAD	
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kendal	2 Dokumen	10.000.000	PAD	
1	06	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya sarana aset penunjang administrasi perkantoran</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PAD</b>	
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab Kendal	10 Unit	25.000.000	PAD	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab Kendal	25 Unit	50.000.00	PAD	
1	06	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Sarana Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>316.275.150</b>	<b>PAD</b>	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kendal	12 Laporan	3.000.000	PAD	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab Kendal	12 Laporan	103.275.150	PAD	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab Kendal	12 Laporan	210.000.000	PAD	

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase pengadaan sarana jasa penunjang administrasi perkantoran</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>4.270.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>360.000.000</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab Kendal	1 unit	25.000.000	PAD		1 Unit	25.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab Kendal	75 Unit	75.000.000	PAD		75 Unit	75.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab Kendal	75 Unit	90.000.000,	PAD		75 Unit	90.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab Kendal	1 Unit	4.000.000.000	PAD		2 Unit	90.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kendal	12 Unit	30.000.000	PAD		12 Unit	30.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kendal	12 Unit	50.000.000	PAD		12 Unit	50.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Percentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>151.280.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>249.000.000</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000,</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>

1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab Kendal	20 Dokumen	20.000.000	PAD		20 Dokumen	20.000.000
1	06	02	2.03		<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga</b>	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>131.280.000</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>229.000.000,</b>
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	100 Orang	30.000.000	PAD		100 Orang	20.000.000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	20 Orang	20.000.000	PAD		20 Orang	20.000.000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	20 Keluarga	20.000.000	PAD		20 Keluarga	40.000.000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	250 Lembaga	20.000.000	PAD		250 Lembaga	80.000.000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan	Kab Kendal	50 Sertifikat	41.280.000	PAD		50 Sertifikat	60.000.000

					Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Prosentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	Kab. Kendal	100 %	50.000.000	PAD		100 %	50.000.000
1	06	03	2.01		<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	Kab. Kendal	100 %	50.000.000	PAD		100 %	50.000.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kendal	5 Orang	50.000.000	PAD		5 Orang	50.000.000
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Prosentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Kab. Kendal	100 %	601.514.800	PAD		100 %	599.590.540
1	06	04	2.01		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Kendal	100 %	322.514.800	PAD		100 %	325.590.540
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kendal	210 Orang	140.000.000	PAD		210 Orang	165.000.000

1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kendal	10 Orang	15.000.000	PAD		10 Orang	15.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	40 Orang	14.000.000	PAD		40 Orang	14.000.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	30 Orang	43.514.800	PAD		30 Orang	40.000.000
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kendal	32 Orang	20.000.000	PAD		32 Orang	20.000.000
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kendal	20 Orang	30.000.000	PAD		20 Orang	41.590.540
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kendal	20 Orang	60.000.000	PAD		20 Orang	30.000.000
1	06	04	2.01		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban</b>	<b>Percentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang</b>	Kab.Kendal	<b>100 %</b>	<b>279.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>274.000.000</b>

					<b>HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti</b>							
1	06	04	2.01	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kendal	20 Orang	20.000.000	PAD		20 Orang	20.000.000
1	06	04	2.01	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	10 Orang	40.000.000	PAD		10 Orang	40.000.000
1	06	04	2.01	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	20 Orang	20.000.000	PAD		20 Orang	40.000.000
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	50 Orang	45.000.000	PAD		50 Orang	20.000.000
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	20 Orang	10.000.000	PAD		20 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	25 Orang	10.000.000	PAD		25 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	20 Orang	4.000.000	PAD		20 Orang	4.000.000
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab Kendal	30 Dokumen	130.000.000	PAD		30 Dokumen	130.000.000

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>561.514.800</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>589.590.540</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Persentase PMKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>35.000.000</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>35.000.000</b>
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	12 Orang	10.000.000	PAD		12 Orang	10.000.000
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	12 Orang	10.000.000	PAD		12 Orang	10.000.000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	12 Orang	15.000.000	PAD		12 Orang	15.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>526.514.800</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>554.590.540</b>
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab Kendal	10000 Keluarga	100.000.000	PAD		10000 Keluarga	100.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	10000 Keluarga	366.514.800	PAD		10000 Keluarga	394.590.540
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	250 Orang	60.000.000	PAD		250 Orang	60.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>215.170.000</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>226.033.500,</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kab Kendal	<b>100 %</b>	<b>155.170.000</b>	PAD		<b>100 %</b>	<b>166.033.500</b>
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan	Kab Kendal	200 Orang	125.170.000	PAD		200 Orang	136.033.500

						3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	60 Orang	30.000.000	PAD		60 Orang	30.000.000
1	06	06	2.02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	2 Kampung	20.000.000	PAD		2 Kampung	20.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	40.000.000	PAD		50 Orang	40.000.000
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP</b>	<b>Kab Kendal</b>	<b>95 %</b>	<b>136.578.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>143.406.900</b>
1	06	07	2.01		<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		<b>Kab Kendal</b>	<b>100 %</b>	<b>136.578.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100 %</b>	<b>143.406.900</b>
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab Kendal	1 Dokumen	79.578.000	PAD		1 Dokumen	66.828.900
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab Kendal	148 Makam	57.000.000	PAD		148 Makam	76.578.000
<b>TOTAL</b>									<b>12.156.128.600</b>				<b>8.220.521.210</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Form : Hasil cetak dari sipd.kendalkab.go.id

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada Tahun 2024 akan melaksanakan 6 Program dengan 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program Pemberdayaan Sosial**

**2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

**2.2 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.**

Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

**3.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- 4. Program Rehabilitasi Sosial
  - 4.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanytar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Permakanan.
- b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
- c. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial.
- d. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanytar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- e. Pemberian Layanan Kedaruratan
- f. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
- g. Pemberian Layanan Rujukan

#### 4.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- a. Pemberian Layanan Kedaruratan
- b. Penyediaan Alat Bantu
- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- e. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- f. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- g. Pemberian Layanan Rujukan
- h. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota.

### 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### 5.1 Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar

Sub Kegiatan:

- a. Penjangkauan Anak-anak Terlantar.
- b. Rujukan Anak-anak Terlantar
- c. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

#### 5.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. Program Penanggulangan Bencana

6.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Makan
- b. Pelayanan Dukungan Psikososial

6.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

7.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kendal merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis guna tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode Tahun 2016-2021 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan oleh Dinas Sosial beserta jajarannya dan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Perangkat Daerah terkait yang membidangi fungsi lain. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang dan seluruh Staff Dinas Sosial secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab, untuk :
  - d. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas , fungsi dan kewenangannya.
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Kendal, Februari 2023.

Kepala Dinas Sosial



# LAMPIRAN

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KAB. KENDAL TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	15.741.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dan daya tampung Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Laporan	14.860.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-			95.000.000,00	DINAS SOSIAL	



















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	227.868.424,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL		













NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase Peningkatan Peranserta PSKS	100.00 %			100.00 %	20.000.000,00						100.00 %	249.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemohon Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah yang ditangani	-			100 %	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang															20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	-			100 %	20.000.000,00			-	Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-	-	229.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															29.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-	-	29.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota															20.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PPKS diluar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100.00 %			100.00 %	854.180.000,00						100.00 %	599.590.540,00			
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial Dasar	-			100 %	727.400.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-	-	325.590.540,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					210 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		165.000.000,00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	363.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-		14.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	363.700.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-			41.590.540,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					25 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	70.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				30 Dokumen	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS SOSIAL		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengertesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					10000 Keluarga	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10.395.942.300,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		394.590.540,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL		
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	95.00 %			95.00 %	18.710.000,00						95.00 %	143.406.900,00			
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	-			100 %	18.710.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-	-	143.406.900,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Kendal, Kendal, Bugangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurang an angka p enganggur an dan kemiskinan	-		66.828.900,00	DINAS SOSIAL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					148 Makam	18.710.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Bugangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	-			76.578.000,00	DINAS SOSIAL	
	J U M L A H						17.707.147.936,00							8.220.521.210,00				



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 050 / 125 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 83);
- 13 Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
    - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024;
    - b. mengordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, monitoring seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penanganan Sosial dan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPERITUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 050 / 145 / 2023  
 TANGGAL :  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT  
 DAERAH  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEMUDIANNAH TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Persiapan dan Keanggotaan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keskretariatan	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepengawasan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyaluhan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyaluhan	
6.	Sub Koordinator Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Data dan Penyaluhan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Perlindungan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial	
10.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Sub Koordinator Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Kepahlawaman, Keperintisan dan Restorasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,


  
DICO M GANINDUTO